

BAB II

TEORI DAN KAJIAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Indonesia memiliki 74.958 Desa dan 8.430 Kelurahan yang menjadi sasaran Dana Desa melalui transfer yang berasal dari Pemerintah. Tahun 2015 Pemerintah sudah menggelontorkan dana sebesar Rp 20,7 Triliun untuk Dana Desa, sementara 2016 meningkat menjadi Rp 47 Triliun dan tahun 2017 sebanyak Rp 60 triliun. Pada tahun 2018 Pemerintah membatalkan kenaikan Dana Desa yang seharusnya Desa mendapatkan dana sebesar 120 Triliun. Pembatalan disebabkan Pemerintah mendapat laporan dari ICW (*Indonesia Corruption Watch*) yang telah mendapati sebanyak 600 kasus tentang penyalahgunaan Dana Desa dan diantaranya 200 kasus tentang penyalahgunaan Administrasi Desa (Kurniawan, 11 Agustus 2017).

Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 menjelaskan bahwa adanya Dana Desa untuk membiayai tujuan Pemerintah seperti penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat. Ditemukan sebanyak 600 kasus tentang penyalahgunaan Dana Desa disebabkan kurangnya pengawasan dalam pengelolaan keuangan desa baik pengawasan dari Desa maupun dari luar Desa (Kecamatan dan Kabupaten) yang mengakibatkan tidak tercapainya tujuan Pemerintah terutama di bidang pemberdayaan masyarakat melalui pengembangan lembaga-lembaga kemasyarakatan sesuai dengan hasil penelitian Rujiman (2014) tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa

yang digunakan dalam pembangunan desa di wilayah perdesaan di Kabupaten Serdang Bedagai. APBDesa mempunyai peranan terhadap pengembangan wilayah perdesaan di Desa Firdaus Kecamatan Sei Rampah Kabupaten Serdang Bedagai, peningkatan pelayanan lembaga Pemerintahan Desa, peningkatan kesejahteraan/kualitas hidup masyarakat, peningkatan sumber daya masyarakat Desa, peningkatan ekonomi masyarakat Desa, peningkatan infrastruktur perdesaan dan peningkatan peran lembaga kemasyarakatan Desa dapat dicapai dengan adanya APBDesa. Pada Desa Firdaus peranan lembaga kemasyarakatan masih terbilang belum optimal, hal ini karena pengalokasian dana yang kurang terhadap lembaga kemasyarakatan Desa sehingga mengakibatkan tingkat ekonomi masyarakat Desa Firdaus masih tergolong rendah.

BPD merupakan lembaga yang berperan penting dalam pengawasan terutama pada penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa. Keanggotaan BPD harus terdiri dari orang-orang berkompeten, paham peraturan-peraturan yang ada, terutama paham dalam menjalankan mekanisme demokrasi di tingkat desa agar tidak memunculkan konflik antar lembaga di Desa dan dapat dipercaya dalam pengambilan keputusan, seperti hasil penelitian Mamesah (2015) yang menjelaskan tentang Peranan Badan Permasyarakatan Desa dalam Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Sendangan Kecamatan Tompaso. Hasil penelitiannya menunjukan BPD masih memerlukan penguatan kapasitas kelembagaan. Kondisi BPD memerlukan penguatan kelembagaan, terutama dalam

melakukan persetujuan mulai dari penyusunan sampai pada pengawasan Peraturan Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) harus mempunyai pemahaman dalam menjalankan mekanisme demokrasi di tingkat desa, karena pemahaman BPD maupun Aparat Desa dalam menjalankan mekanisme demokrasi dapat menjadi penyebab munculnya konflik antar lembaga di desa yang menyebabkan permusuhan dan hilangnya rasa saling gotong royong dalam mewujudkan tujuan Pemerintah.

Kurangnya pengawasan juga berdampak pada penatausahaan dalam pengelolaan keuangan desa. Bendahara Desa dalam penatusahaan harusnya melakukan pemisahan antara penerimaan dan pengeluaran kas. Dampak dari kurangnya pengawasan tersebut tercermin dalam penelitian Hanifah (2015) mengenai Akuntabilitas dan Transparansi Pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, dengan hasil penelitian bahwa dalam proses pencatatan akuntansi di Desa Kepatihan Kecamatan Menganti Kabupaten Gresik telah dilaksanakan, tetapi belum berjalan dengan baik dan belum sesuai Undang-Undang No.6 Tahun 2014. Sistem pencatatan penerimaan dan pengeluaran kas pada Desa Kepatihan Kecamatan Menganti Kabupaten Gresik belum melakukan pemisahan pencatatan antara sistem penerimaan kas dan pengeluaran kas yang seharusnya dicatat ke dalam buku kas pembantu perincian obyek penerimaan dan buku kas pembantu perincian obyek pengeluaran, sehingga mengakibatkan kurang efektif dan efisien dalam pengelolaan keuangan desa.

a. Sumber daya manusia juga mempengaruhi adanya penyalahgunaan Dana Desa. Minimnya pengetahuan Aparat Desa tentang kegunaan Dana Desa membuat mereka hanya memikirkan kepentingan diri sendiri tanpa memikirkan kesejahteraan rakyat dan tujuan dari adanya Dana Desa, hal ini juga didukung dengan jumlah dana yang masuk ke desa tidak sedikit dan tanpa ditunjang dengan pengawasan yang memadai. Maraknya manipulasi

laporan keuangan merupakan salah satu strategi dalam penyalahgunaan Dana Desa. Minimnya pengetahuan Aparat Desa juga mempengaruhi pembuatan laporan keuangan, dalam penelitian Linda (2017) tentang pengelolaan dan pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Kolongan Kecamatan Kombi Kabupaten Minahasa, dengan hasil penelitian pengelolaan dan pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa di Desa Kolongan Kecamatan Kombi Kabupaten Minahasa Provinsi Sulawesi Utara belum sesuai dalam pembuatan laporan pertanggungjawabannya dikarenakan beberapa kendala seperti sumber daya manusia yang ada di Desa Kolongan Kecamatan Kombi Kabupaten Minahasa di tingkat pendidikan Aparatur Permerintah Desa yang tergolong rendah dan kurangnya pemahaman Aparat Desa mengenai teknis pembuatan laporan pertanggungjawaban, sehingga laporan keuangan tidak akurat dan sulit dipertanggungjawabkan dalam kebenarannya.

B. Kajian Pustaka

1. Pengertian Desa

Berdasarkan UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, bahwa Desa memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus urusan Pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati. Jadi yang dimaksud penyelenggaraan urusan Pemerintahan adalah untuk mengatur, mengurus urusan Pemerintahan, dan kepentingan masyarakat setempat. Kemudian berdasarkan ketentuan umum Pasal 1 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Pemerintah Desa adalah Kepala Desa, dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintahan Desa. Pemerintahan Desa adalah penyelenggara urusan Pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Menurut Kiki (2015) terkait dengan Desa terungkap bahwa norma-norma daerah hukum masyarakat itu menurut hukum adat: (1) berhak mempunyai wilayah sendiri yang ditentukan oleh batas-batas yang sah, (2) berhak mengurus dan mengatur Pemerintahan dan rumah tangganya sendiri, (3) berhak mengangkat pimpinan atau majelis Pemerintahannya sendiri, (4) berhak memiliki harta benda dan sumber keuangannya sendiri, (5) berhak atas tanahnya sendiri, (6) berhak memungut pajak sendiri.

Data statistik tentangnya seperti jalan Desa, gedung SD, Polindes (Poliklinik Desa), kantor Pemerintah Desa, kendaraan umum dan infrastruktur lainnya, dapat ditemukan dengan mudah. Jika dilihat dari jumlah

yang ada maka penyebaran infrastuktur tidak merata antar Desa di Jawa, apalagi dibandingkan dengan Desa di luar Jawa (Irma, 2015).

2. Pengelolaan Keuangan Desa

Berdasarkan Permendagri nomor 113 tahun 2014 tentang pengelolaan keuangan Desa menyebutkan bahwa keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa. Keuangan Desa wajib dikelola secara transparan, akuntabel, partisipatif, serta dilakukan secara tertib dan disiplin anggaran, serta memenuhi aspek-aspek yang telah tercantum pada Permendagri 113 Tahun 2014, yaitu perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban.

Dalam Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 Bab III Pasal 3, disebutkan bahwa Kepala Desa sebagai Kepala Pemerintah Desa adalah pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan Desa dan mewakili Pemerintah Desa dalam kepemilikan Kekayaan Desa yang dipisahkan, dengan kewenangan berikut :

- a. Menetapkan kebijakan pelaksanaan APBDesa;
- b. Menetapkan PTPKD (Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa);
- c. Menetapkan petugas yang melakukan pemungutan penerimaan Desa;

- d. Menyetujui pengeluaran atas kegiatan yang ditetapkan dalam APBDesa;
- e. Melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban APBDesa.

Kepala Desa dalam melaksanakan pengelolaan Keuangan Desa, dibantu oleh Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa (PTPKD), yang terdiri dari Sekretaris Desa dan Perangkat Desa. Sekretaris Desa bertindak selaku koordinator pelaksana pengelolaan Keuangan Desa dan bertanggungjawab kepada Kepala Desa. Tugas sekretaris desa adalah:

- a. Menyusun dan melaksanakan kebijakan pengelolaan APBDesa;
- b. Menyusun rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa, perubahan APBDesa dan pertanggungjawaban pelaksanaan APBDesa;
- c. Melakukan pengendalian terhadap pelaksanaan kegiatan yang telah ditetapkan dalam APBDesa;
- d. Menyusun pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan APBDesa; dan
- e. Melakukan verifikasi terhadap bukti-bukti penerimaan dan pengeluaran APBDesa.

Dalam ketentuan umum, Permendagri nomor 66 tahun 2007 tentang Perencanaan Pembangunan Desa, dinyatakan bahwa Rencana Pembangunan Jangka Menengah desa (RPJMDesa) disusun dalam periode 5 (lima) tahun atau semasa jabatan Kepala Desa, yang memuat tujuan kebijakan

Pembangunan Desa, tujuan kebijakan Keuangan Desa, kebijakan umum, program dan satuan program Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), lintas SKPD, dan program prioritas kewilayahan, disertai dengan rencana kerja. RPJM Desa ditetapkan paling lambat 3 (tiga) bulan ketika Kepala Desa selesai dilantik. Kepala Desa bersama Badan Permusyawaratan Desa (BPD) menyusun RKPDesa yang merupakan penjabaran dari RPJMDesa dan berdasarkan hasil musyawarah rencana Pembangunan Desa. RPJM-Desa ditetapkan dengan Peraturan Desa, sedangkan RKPDesa ditetapkan dengan peraturan Kepala Desa.

Dura (2016), menyebutkan bahwa anggaran kinerja pada dasarnya adalah sistem penyusunan dan pengelolaan Anggaran Desa yang berorientasi untuk pencapaian tujuan. Kinerja tersebut harus mencerminkan efisiensi dan efektivitas pada pelayanan publik, yang berarti harus berorientasi pada kepentingan publik. Proses penyusunan dan pelaksanaan APBDesa harus

difokuskan pada upaya guna mendukung pelaksanaan program dan kegiatan, akan menjadi prioritas Desa yang bersangkutan dan dengan memperhatikan asas umum APBDesa.

Dalam Permendagri nomor 113 tahun 2014 bagian ketiga pasal 35 dan 36, dinyatakan bahwa:

- a. Penatausahaan dilakukan oleh Bendahara Desa
- b. Bendahara Desa wajib melakukan pencatatan setiap penerimaan, pengeluaran serta tutup buku setiap akhir bulan secara tertib.

- c. Bendahara Desa wajib mempertanggungjawabkan uang melalui laporan pertanggungjawaban.
- d. Laporan pertanggungjawaban disampaikan setiap bulan kepada Kepala Desa dan paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya.
- e. Penatausahaan penerimaan dan pengeluaran menggunakan buku kas umum, buku kas pembantu pajak, buku Bank.

3. Kebijakan Keuangan Desa

Dalam penyelenggaraannya kewenangan Desa didanai dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes), adalah bantuan Pemerintah dan Pemerintah Daerah. Sedangkan penyelenggaraan keperluan Pemerintah Daerah yang diselenggarakan oleh Pemerintah Desa didanai melalui APBD. Sumber-sumber Pendapatan Desa yang telah diatur dalam Pemendagri tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa adalah sebagai berikut:

- a. Pendapatan Asli Desa (PADesa);
- b. Bagi hasil pajak Kabupaten/Kota;
- c. Bagian dari Retribusi Kabupaten/Kota;
- d. Alokasi Dana Desa;
- e. Bantuan Keuangan dari Pemerintah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota dan Desa lainnya;
- f. Hibah;
- g. Sumbangan pihak ketiga.

Pendapatan Desa lebih rinci dijabarkan dalam Peraturan Pemerintah 72 Tahun 2005 tentang Desa pasal 68 ayat 1 yaitu:

- a. Pendapatan Asli Desa, terdiri dari hasil usaha Desa, hasil kekayaan Desa, hasil swadaya dan partisipasi, hasil gotong royong, dan lain-lain pendapatan asli Desa yang sah;
- b. Bagi hasil pajak daerah Kabupaten/Kota paling sedikit 10% (sepuluh per seratus) untuk Desa dan dari retribusi Kabupaten/Kota sebagian diperuntukkan bagi Desa;
- c. Bagian dari dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh Kabupaten/Kota untuk Desa paling sedikit 10% (sepuluh per seratus), yang pembagiannya untuk setiap Desa secara proporsional yang merupakan Alokasi Dana Desa;
- d. Bantuan keuangan dari Pemerintah, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten/Kota dalam rangka pelaksanaan urusan Pemerintahan;
- e. Hibah dan sumbangan dari pihak ketiga yang tidak mengikat.

4. Laporan Keuangan Desa

Laporan kinerja Desa dicerminkan oleh Laporan Operasional Desa, yang menunjukkan berbagai aliran APBN (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara) dan PAD (Pendapatan Asli Daerah) sebagai pendapatan, dan berbagai beban strategis Desa. Laporan beban menggambarkan realisasi strategi Desa. Laporan Keuangan Desa, akan menggambarkan kondisi Indonesia sesungguhnya, karena itu Pedoman Umum Sistem Akuntansi

Pemerintahan (PUSAP) dalam Peraturan Pemerintah nomor 71 tahun 2010. Untuk menggambarkan situasi Desa tersebut secara nasional, tugas BPKP adalah mengawal aplikasi SIMDA (Sistem Informasi Manajemen Daerah) sedemikian rupa agar diterapkan dengan baik pada semua Desa bukan sebatas Kabupaten dan Kota mandiri.

5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes)

APBDes adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Desa yang dibahas dan disetujui bersama Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa, dan ditetapkan dengan Peraturan Desa dan merupakan suatu rencana keuangan tahunan Desa dan ditetapkan berdasarkan Peraturan Desa tentang APBDesa guna mendukung kebutuhan program Pembangunan Desa tersebut. Adanya APBDesa penyelenggaraan Pemerintahan Desa dapat memiliki sebuah rencana pengelolaan Keuangan Desa yang terstruktur berdasarkan anggaran yang tersedia dan yang digunakan. Anggaran desa dapat digunakan secara seimbang berdasarkan prinsip pengelolaan keuangan Daerah supaya ter cipta tata kelola yang baik (*good governance*). Oleh sebab itu APBDesa diharapkan dapat mendorong Pemerintah Desa agar mampu memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat Desa melalui perencanaan pembangunan yang ada di dalamnya. Beberapa fungsi APBDesa menurut Yuliansyah (2015) bahwa :

- a. Fungsi otorisasi. APBDesa menjadi target fiskal yang menggambarkan keseimbangan antara belanja, pendapatan dan pembiayaan yang

diinginkan sebagai dasar untuk melaksanakan pendapatan dan belanja Desa pada tahun yang bersangkutan.

- b. Fungsi perencanaan. APBDesa merupakan pernyataan kebijakan publik sebagai pedoman bagi manajemen dalam merencanakan kegiatan pada tahun yang bersangkutan.
- c. Fungsi pengawasan. APBDesa menjadi pedoman pengendalian yang memiliki konsekuensi hukum untuk menilai apakah kegiatan penyelenggaraan Pemerintahan Desa sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan.
- d. Fungsi alokasi. APBDesa harus diarahkan untuk menciptakan lapangan kerja, mengurangi pengangguran dan pemborosan sumber daya, serta meningkatkan efisiensi dan efektivitas perekonomian Desa.
- e. Fungsi distribusi. Kebijakan APBDesa harus memperhatikan rasa keadilan dan kepatuhan masyarakat.
- f. Fungsi akuntabilitas. APBDesa memberi landasan penilaian kinerja Pemerintah Desa, hasil pelaksanaan anggaran yang dituangkan dalam laporan keuangan Pemerintah Desa sebagai pernyataan pertanggungjawaban Pemerintah Desa kepada publik.

6. Struktur Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDESA)

Permendagri No.113 Tahun 2014 menjelaskan APBDesa terdiri dari Pendapatan Desa, Belanja Desa, dan Pembiayaan Desa. Pendapatan Desa dan Belanja Desa diklasifikasikan menurut kelompok, kegiatan dan jenis.

a. Pendapatan

Pendapatan Desa menurut Permendagri No. 113 Tahun 2014 merupakan semua penerimaan uang melalui rekening Desa yang merupakan hak desa dalam 1 (satu) tahun anggaran yang Desa tidak perlu membayar kembali. Pendapatan Desa terdiri atas Pendapatan Asli Desa (PADesa), Pendapatan Transfer dan pendapatan lain-lain.

1). Pendapatan Asli Desa (PADesa)

Pendapatan Asli desa merupakan pendapatan yang diperoleh dari potensi pendapatan yang ada di desa. Kelompok pendapatan asli daerah terdiri dari:

- a) Hasil usaha seperti hasil BUMDes, tanah kas desa
- b) Hasil aset antara lain tambatan perahu, pasar Desa, tempat pemandian umum, jaringan irigasi,
- c) Swadaya, partisipasi, dan gotong royong adalah membangun dengan kekuatan sendiri yang melibatkan peran serta masyarakat berupa tenaga, barang yang dinilai dengan uang.
- d) Lain-lain pendapatan asli Desa antara lain hasil pungutan Desa.

2). Pendapatan transfer

Pendapatan transfer merupakan pendapatan desa yang diperoleh dari entitas seperti tranfer dari Pemerintah Kota dan Kabupaten, transfer dari Pemerintah Provinsi dan transfer dari Pemerintah Pusat. Kelompok transfer terdiri atas:

a) Dana Desa

Dana desa menurut PP No 60 Tahun 2014 adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten/Kota bertujuan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan Pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat. Pemerintah mengalokasikan dana desa secara nasional dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja negara (APBN) setiap tahun. Dana desa tersebut bersumber dari Belanja Pemerintah dengan mengefektifkan program yang berbasis Desa secara merata dan berkeadilan.

PP No 22 Tahun 2015 menyoroti tentang perubahan pengalokasian Dana Desa yang tercantum dalam pasal 11, pembagian dana dialokasikan berdasarkan jumlah Desa dan dialokasikan berdasarkan alokasi dasar dan alokasi yang dihitung dengan perhitungan jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, dan tingkat kesulitan geografis Desa setiap Kabupaten/Kota. Dalam rangka mengentaskan kemiskinan, Dana Desa juga dapat untuk memenuhi kebutuhan primer pangan, sandang dan papan masyarakat. Penggunaan Dana Desa mengacu pada RPJMDesa dan RKPDesa.

b) Bagian dari hasil pajak daerah Kabupaten/Kota dan retribusi daerah

Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 menyebut Pemerintah Kabupaten/Kota prosentase mengalokasikan bagian dari hasil pajak dan retribusi daerah Kabupaten/Kota kepada Desa adalah paling sedikit 10% (sepuluh perseratus) dari realisasi penerimaan hasil pajak dan retribusi daerah Kabupaten/Kota, dengan ketentuan:

1. 60% (enam puluh perseratus) dibagi secara merata kepada seluruh Desa
2. 40% (empat puluh perseratus) dibagi secara proposional berdasarkan realisasi penerimaan hasil pajak dan retribusi daerah dari masing-masing Desa.

c) Alokasi Dana Desa

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 Alokasi Dana Desa (ADD) adalah dana yang dialokasikan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota untuk Desa, yang bersumber dari bagian dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh Kabupaten/Kota. Alokasi Dana Desa (ADD) juga mempunyai tujuan yaitu:

- a. Menanggulangi kemiskinan dan mengurangi kesenjangan,
- b. Meningkatkan perencanaan, penganggaran dan pelaksanaan pembangunan di tingkat desa dan pemberdayaan masyarakat,

- c. Meningkatkan pembangunan infrastuktur perdesaan
- d. Meningkatkan pengamalan nilai-nilai keagamaan, sosial budaya dalam rangka mewujudkan peningkatan social
- e. Meningkatkan ketentraman dan ketertiban masyarakat
- f. Meningkatkan pelayanan pada masyarakat Desa dalam rangka pengembangan kegiatan sosial dan ekonomi masyarakat
- g. Mendorong peningkatan keswadayaan dan gotong royong masyarakat
- h. Meningkatkan pendapatan Desa dan kesejahteraan masyarakat Desa melalui Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa).

Tugas pembantu dari Pemerintah, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Desa harus disertai dengan pembiayaan, sarana dan prasarana, serta sumber daya manusia, oleh karena itu harus ada anggaran sebagai modal pembangunan untuk kesejahteraan masyarakat yang disebut Alokasi Dana Desa (ADD) dana lanjutan dari program desa sejak tahun 1969, diberikan oleh Pemerintah pusat dalam bentuk inpres pembangunan Desa.

Prinsip Alokasi Dana Desa Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) menurut Pemendagri 37 tahun 2007 dapat dilihat berdasarkan variabel independen utama dan variabel independen tambahan dengan rumus sebagai berikut:

- a. Azas Merata adalah besarnya pembagian dana Alokasi Dana Desa (ADD) yang sama untuk setiap desa . 70% variabel independen utama dan 30 % variabel independen tambahan
- b. Azas Adil adalah pembagian secara proporsional Alokasi Dana Desa untuk setiap Desa yang dihitung berdasarkan rumus dan variabel tertentu atau Alokasi Dana Desa (ADD) Proporsional (ADDP), variabel proporsional utama sebesar 60% dan variabel proporsional tambahan sebesar 40%. Alokasi Dana Desa harus memenuhi prinsip:
 1. Pengelolaan keuangan ADD bagian yang tidak terpisahkan dari pengelolaan keuangan desa dalam APBDes;
 2. Seluruh kegiatan yang didanai oleh ADD direncanakan, dilaksanakan, dan dievaluasi dengan melibatkan seluruh unsur masyarakat;
 3. Seluruh kegiatan harus dapat dipertanggungjawabkan secara administratif, teknis, dan hukum;
 4. ADD dilaksanakan dengan menggunakan prinsip hemat, terarah dan terkendali.

d) Bantuan Keuangan dari APBD Provinsi dan Kabupaten/Kota

Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dapat memberikan bantuan keuangan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)

Kabupaten/Kota kepada Desa. Bantuan keuangan dapat bersifat umum dan khusus. Bantuan keuangan yang bersifat umum, diperuntukkan dan penggunaannya diserahkan sepenuhnya kepada Desa penerima bantuan dalam rangka membantu pelaksanaan tugas Pemerintah Daerah di Desa. Bantuan keuangan yang bersifat khusus diatur dan ditetapkan oleh Pemerintah Daerah pemberi bantuan dalam rangka mempercepat pembangunan Desa dan pemberdayaan masyarakat.

b. Belanja Desa

Belanja Desa menurut Permendagri No 113 Tahun 2014 meliputi pengeluaran dari Rekening Desa dan jadi kewajiban Desa dalam 12 bulan anggaran yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh Desa. Belanja Desa meliputi kelompok Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, Pelaksanaan pembangunan Desa, Pembinaan kemasyarakatan Desa, Pemberdayaan masyarakat Desa dan Belanja tak terduga. Kelompok belanja tersebut dibagi dalam kegiatan- kegiatan yang sesuai dengan kebutuhan Desa yang telah dituangkan dalam RKPDesa yaitu :

- a. Belanja pegawai, dianggarkan untuk pengeluaran tetap dan tunjangan bagi Kepala Desa, Perangkat Desa dan BPD setiap bulan.
- b. Belanja barang dan jasa untuk pengeluaran pembelian/pengadaan barang yang nilai manfaatnya kurang dari 12 bulan, antara lain : alat tulis kantor, benda pos, bahan/material, sewa kantor Desa, pemeliharaan, cetak/penggandaan, makanan dan minuman rapat,

sewa perlengkapan dan peralatan kantor, honorarium narasumber/ahli, pakaian dinas dan atributnya, perjalanan dinas, upah kerja, operasional Pemerintah Desa, operasional BPD, insentif rukun tetangga/rukun warga, dan pemberian barang pada masyarakat/kelompok masyarakat.

- c. Belanja modal, digunakan untuk pembelian /pengadaan barang atau bangunan yang nilai manfaatnya lebih dari 1 tahun

c. Pembiayaan Desa

Pembiayaan Desa berdasarkan permendagri No 113 Tahun 2014 meliputi semua penerimaan yang pengeluarannya akan diterima kembali, baik dalam 1 tahun anggaran maupun lebih dari 1 tahun. Pembiayaan Desa terdiri atas kelompok :

a. Penerimaan pembiayaan

Mencakup Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) tahun sebelumnya, pencairan dana cadangan dan hasil dari penjualan kekayaan Desa yang dipisahkan.

b. Pengeluaran pembiayaan

Terdiri dari pembentukan dana cadangan, dan penyertaan modal Desa. Pembentukan dana cadangan ditetapkan oleh Peraturan Desa minimal memuat penetapan tujuan pembentukan dana cadangan, program dan kegiatan yang akan dibiayai dari dana cadangan, besaran dan rincian tahunan cadangan yang harus dianggarkan, sumber dana cadangan dan tahun anggaran pelaksanaan dana cadangan.

1. Good Governance

Menurut (Agus, 2015) *good governance* adalah kekuasaan yang didasarkan pada peraturan perundang-undangan, kebijakan-kebijakan yang diambil secara transparan, dan dapat dipertanggung-jawabkan (akuntabel) kepada masyarakat. Secara umum *good governace* mengandung unsur akuntabilitas, transparansi, keterbukaan dan aturan hukum. *Good governance* yang efektif menuntut adanya koordinasi yang baik, integritas, profesionalisme, etos kerja dan moral yang tinggi.

